LAMPIRAN L
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

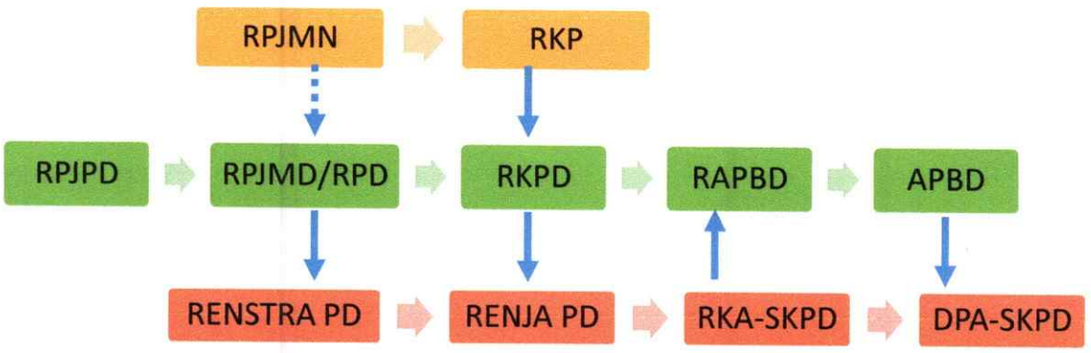
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan

f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tantang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2026;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Badan kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas dan kewajiban dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapiltuasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan 2024 s/d 2026)

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8	**Urusan Pemerintahan Umum**									
8,01	**Kesatuan Bangsa dan Politik**									
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72,31 Nilai	74 Nilai	76 Nilai	72 Nilai	95%	77 Nilai	74 Nilai	96%
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan	17 Dok	4 lap	15 lap	15 lap	100%	15 lap	15 lap	100%
8.01.01.2.01.0001	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 dok	-	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
8.01.01.2.01.0006	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	11 lap	4 lap	11 lap	11 lap	100%	11 lap	11 lap	100%
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	- -	3 dok	39 dok	41 dok	105%	39 dok	39 dok	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 org/bln	- -	- -	- -	-	- -	- -	-
8.01.01.2.02.0001	*Penyediaan gaji dan tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	180 org/bln	14 org/bln	15 org/bln	14 org/bln	93%	15 org/bln	15 org/bln	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	13 Lap							
8.01.01.2.02.0005	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 lap	1 lap	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.02.0007	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 lap	16 lap	12 lap	12 lap	100%	12 lap	12 lap	100%
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen peningkatan disiplin kepegawaian yang disiapkan	2 dok	2 dok	2 dok	1 dok	50%	2 dok	1 dok	50%
8.01.01.2.05.0002	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 paket	2 dok	1 paketfd	0 paket	0%	1 paket	0 paket	0%
8.01.01.2.05.0011	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 orang	30 org	30 org	30 org	100%	30 orang	30 orang	100%
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun	4 Laporan	4 dok	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
8.01.01.2.06.0004	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	5 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	5 paket	5 paket	100%
8.0101.2.06.0005	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100%	3 paket	3 paket	100%
8.01.01.2.06.0006	*Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	12 dokumen	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
8.01.01.2.06.0009	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	26 laporan	30 lap	26 lap	38 lap	146%	26 laporan	26 laporan	100%
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	20 Unit	1 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	4 dok	100%
8.01.01.2.07.0005	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 unit	-	58 unit	58 unit		129 unit	129 unit	100%
8.01.01.2.07.0006	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	18 unit	7 unit	13 unit	13 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disusun	13 laporan	3 dok	4 laporan	3 laporan	75%	4 laporan	4 laporan	100%
8.01.01.2.08.0001	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1 laporan	1 lap	1 lap	1 lap	100%	1 laporan	1 laporan	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.01.01.2.08.0002	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 laporan	3 lap	3 lap	2 lap	67%	2 laporan	2 laporan	100%
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan perawatan	48 unit	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
8.01.01.2.09.0002	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	8 unit	8 unit	8 unit	7 unit	88%	8 unit	8 unit	100%
8.01.01.2.09.0005	*Pemeliharaan Mebel*	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	10 unit	-	25 unit	25 unit	100%	10 unit	10 unit	100%
8.01.01.2.09.0006	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	29 unit	30 unit	33 unit	33 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
8.01.01.2.09.0009	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	247200%	80%	88%	110%	80%	80%	100%
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	3100 orang	662 org	2.472 org	2.106 org	85%	3300 orang	3000 orang	91%
8.01.02.2.01.0003	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	3100 orang	662 org	2.400 org	2.106 org	88%	3300 orang	3000 orang	91%
8.01.02.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	4 laporan	4 lap	3 lap	3 lap	100%	4 laporan	4 laporan	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.02.2.01.0007	*Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka*	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka*	1 dok	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD	100%	100%	80%	100%	125%	80%	80%	100%
		Cakupan pemahaman pendidikan politik bagi masyarakat	81%							
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik	9 parpol	10 parpol	10 parpol	10 parpol	100%	9 parpol	9 parpol	100%
8.01.03.2.01.0003	*Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	1000 orang	194 org	600 org	589 org	98%	1000 orang	965 orang	97%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.03.2.01.0004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	27 orang	10 parpol	42 orang	42 orang	100%	33 orang	33 orang	100%
8.01.03.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	4 laporan	3 lap	3 lap	3 lap	100%	4 laporan	4 laporan	100%
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase ormas penerima hibah	67%	100%	80%	100%	125%	80%	80%	100%
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam penguatan demokrasi	4 ormas	5 ormas	21 ormas	21 ormas	100%	5 ormas	5 ormas	100%
8.01.04.2.01.0003	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	112 orang	5 ormas	115 orang	92 orang	80%	115 orang	115 orang	100%

Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.04.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	4 laporan	3 lap	3 lap	3 lap	100%	4 laporan	4 laporan	100%
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan	100%	93%	80%	98%	123%	80%	80%	100%
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah kegiatan yang difasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan	10 Kegiatan	278 org	1.200 org	1.180 org	98%	1300 orang	1250 orang	96%
8.01.05.2.01.0004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	1050 orang	278 org	1.200 org	1.180 org	98%	1300 orang	1250 orang	96%
8.01.05.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	4 laporan	3 lap	3 lap	3 lap	100%	4 laporan	4 laporan	100%
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Cakupan laporan kewaspadaan dini di daerah yang ditindaklanjuti	100%	88%	80%	86%	108%	80%	80%	100%

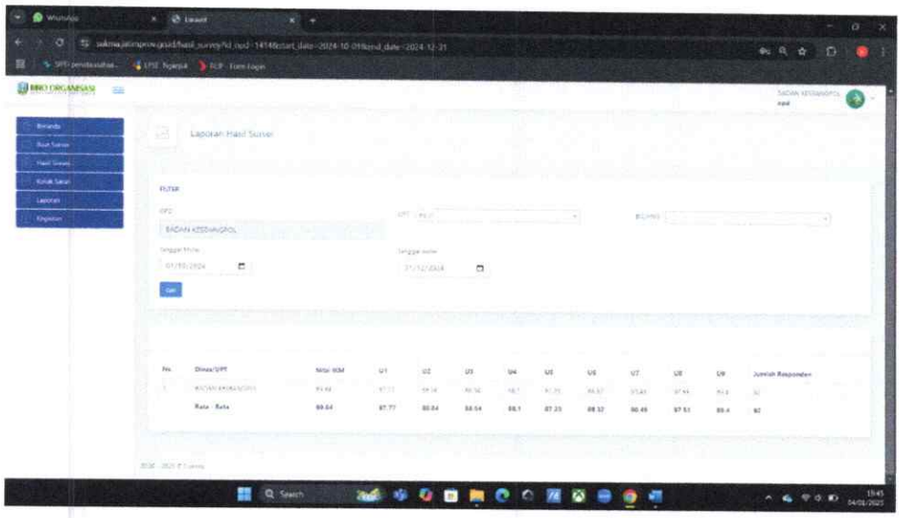
Kode Rek.	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian target rentsra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD (Tahun 2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah laporan kewaspadaan dini yang disusun	12 Laporan	350 org	250 orang	218 orang	87%	200 orang	200 orang	100%
8.01.06.2.01.0004	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	100 orang	350 org	250 org	218 org	87%	200 orang	200 orang	100%
8.01.05.2.01.0005	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	12 laporan	12 lap	12 lap	12 lap	100%	12 laporan	12 laporan	100%
8.01.05.2.01.0006	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%

Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik berupaya mewujudkan suasana yang harmonis dalam kehidupan masyarakat dan umat beragama. Upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera dilakukan dengan meminimalisir benturan antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial. Tercapainya target kinerja sasaran ini tidak bisa lepas dari tercapainya program perangkat daerah sebagai pendukung sasaran.

Penjelasan capaian Kinerja Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Indikator dari Program ini adalah Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan target Nilai adalah 76, realisasinya adalah 72,10 dengan Peridikat "BB" sehingga capaian kinerja sebesar 95%. Sedangkan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat melalui e sukma jatimprov, adalah sebesar 89,64 Nilai Indeks.



Sedangkan Indikator dari Kegiatan terdiri dari :

1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun dengan target 15 Laporan dan telah tercapai 15 laporan sehingga capaian kinerja adalah 100%.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan target 39 dokumen dan telah tercapai 41 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 103%. Dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan gaji sebanyak 14 dokumen, TPP sebanyak 14 dokumen, laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen, dan laporan realisasi anggaran dan SPJ Fungsional sebanyak 12 laporan.

1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan dengan target 2 dokumen dan telah tercapai 1 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 50%. Dokumen tersebut adalah dokumen pelaksanaan bimbingan teknis. Sedangkan dokumen yang tidak tercapai adalah dokumen pengadaan pakaian dinas karena pada saat penyusunan RKA terdapat kebijakan dari TAPD untuk tidak menganggarkan pengadaan pakaian dinas.

1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen administrasi umum yang disediakan dengan target 4 jenis dan telah tercapai 4 jenis sehingga capaian kinerja adalah 100%. Jenis dokumen tersebut adalah dokumen pengadaan bahan logistik, barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan, maupun perjalanan dinas.

1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan dengan target 4 dokumen dan telah tercapai 4 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Jenis dokumen tersebut adalah dokumen pengadaan barang dan jasa selama Tahun Anggaran 2024.

1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan dengan target 4 laporan dan telah tercapai 3 laporan sehingga capaian kinerja adalah 75%. Jenis dokumen tersebut adalah dokumen pertanggungjawawan jasa surat-menyurat, listrik dan telpon.

1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan dengan target 4 Jenis dan telah tercapai 4 Jenis sehingga capaian kinerja adalah 100%. Jenis dokumen tersebut adalah pemeliharaan kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin serta bangunan gedung kantor.

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Indikator dari program ini adalah Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 80% sedangkan realisasinya adalah 88% sehingga capaian kinerja adalah 110%. Dari Persentase tersebut didapat dari jumlah target sebanyak 2.470 orang namun realisasinya adalah 2.106 orang.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

   Implementasi dari Program ini dijabarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik. Penekanan pada Program ini adalah memberdayakan partai politik dengan dukungan dana hibah kepada partai politik, Hibah Pemilukada kepada KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim. Dalam hal ini telah dilakukan pencairan dana hibah kepada 10 partai politik pada tribulan I Tahun 2024 dan dana Pemilukada. Selain itu dilakukan koordinasi antar lintas sektor demi mewujudkan Keberlangsungan Pemilu Umum maupun Pemilukada 2024.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

   Implementasi dari Program ini dijabarkan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase ormas yang berperan aktif dalam pembangunan. Sampai dengan tribulan IV telah dilakukan pencairan belanja hibah kepada Ormas yaitu sebanyak 21 ormas

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

   Indikator dari program ini adalah Persentase peningkatan dan pemahaman Masyarakat terhadap ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan target 80% sedangkan realisasinya sebesar 98% sehingga capaian kinerja adalah 123%. Target peserta sebanyak 1.200 orang, realisasinya adalah sebanyak 1.181 orang.

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator dari program ini adalah persentase peningkatan kewaspadaan, dengan target 80% sedangkan realisasinya adalah sebesar 85,3%. Data tersebut didapat dari target sebanyak 300 orang namun realisasinya adalah 218 orang

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	Sangat Tinggi

Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Telah memaksimalkan Kinerja	Target kinerja tercapai	Mempertahankan kinerja
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	88%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadi kekosongan pejabat dan pegawai yang ada merangkap jabatan yang kosong	Terdapat risiko kurang tercapainya target kinerja	Meningkatkan kinerja melalui kerjasama dan saling membantu antara pegawai
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidik-An Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Terjadi kekosongan pejabat dan pegawai yang ada merangkap jabatan yang kosong	Terdapat risiko kurang tercapainya target	Meningkatkan kinerja dan mengurangi kegiatan yang tidak efisien
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Telah memaksimalkan Kinerja	Tercapainya target kinerja	Mempertahankan kinerja
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	98%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kerjasama antar pegawai	Tercapainya target kinerja	Mempertahankan kinerja
Program Peningkatan Kewaspada-An Nasional Dan Peningkatan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	100%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Telah memaksimalkan Kinerja	Target kinerja tercapai	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal,

serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Tahun Renstra Perangkat Daerah				Realiasai Capaian				Proyeksi	Capaian Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	-
1.	Persentase masyarakat/lembaga yang meningkat Wawasan Kebangsaannya	-	√	80%	80%	85%		78%	80%	87%			-
2.	Peresentase penanganan Konflik Sosial dan kehidupan beragama	-	-	65%	70%	85%		75%	91%	100%			-
3.	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi						93%				100%	94%	-

Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Dalam hal ini diprioritaskan upaya pencegahan konflik melalui program dan kegiatan yang ada pada Bakesbangpol.

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut maka kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami peningkatan, hal ini merupakan kerja keras untuk mencapai tujuan dan sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dari tahun ke tahun selalu berupaya menangani konflik sosial melalui upaya pencegahan.

Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 65%, realisasinya adlah 75%. Data tersebut didapat dari laporan dimana terdapat 4 permasalahan dan yang belum tertangani sebanyak 1 permasalahan yaitu perselisihan pendirian rumah do'a kanaan di Loceret.

Pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar 70%, realisasinya adlah 91%. Data tersebut didapat dari laporan selama tahun 2022 yaitu sebanyak 11 permasalahan dan 1 permasalahan yang belum tertangani diakibatkan terjadinya pro dan kontra diantara masyarakat dimana hal tersebut memicu demo tandingan.

Pada tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 85%, realisasinya adlah 100%. Data tersebut didapat dari 6 konflik/potensi konflik dimana keenam potensi konflik tersebut telah tertangani.

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah "Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera", dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta Tangguh.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.5

Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2023

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2019)	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Tujuan SDGs 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan											
	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun											
	Persentase konflik sosial yang tertangani	%	67	80	67	80	75	85	91	90	100	

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2023

Berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk memberikan kontibusi terhadap tujuan ke- 16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

2.3. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Nganjuk.

1. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal dasar suksesnya pembangunan Nasional
2. Rendahnya semangat Nasionalisme yang masih menghinggapi masyarakat serta pemahaman, pengamalan dan penghayatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Meningkatknya pengaruh era pasar bebas yang masuk dalam warga masyarakat terutama masalah Ideologi bangsa yang harus diwaspadai dengan melibatkan peran aktif segenap elemen baik Instansi Pemerintah, masyarakat dan Ormas/LSM untuk melakukan deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun luar negeri
4. Kondisi stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya tali persatuan dan kesatuan bangsa utamanya dalam rangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Tahun 2024.
5. Keterlibatan dan peran aktif jajaran Forkopimda, Ormas, Partai Politik, Tokoh agama, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya dalam mewujudkan situasi dan stabilitas daerah yang kondusif

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol dalam meningkatkan kinerja pelayanan :

- Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol.

- Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang memadai, seperti sistem informasi, teknologi, dan fasilitas kerja.
- Penambahan SDM yang kompeten dan profesional di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai Kesbangpol untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja.
- Memfokuskan program dan kegiatan pada isu-isu strategis yang menjadi prioritas, seperti peningkatan wawasan kebangsaan, dan penanganan konflik sosial.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta melakukan perbaikan dan pengembangan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi pemerintah lainnya, TNI/Polri, organisasi masyarakat, dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat, terutama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda, dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menyebarkan informasi secara efektif dan tepat sasaran mengenai program dan kegiatan Kesbangpol kepada masyarakat.
- Memanfaatkan media massa, media sosial, dan platform digital lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan stabilitas politik di Indonesia. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Kesbangpol seringkali menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan, antara lain:

- Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program dan kegiatan Kesbangpol.
- Masih rendahnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga rentan terhadap pengaruh ideologi lain.
- Adanya polarisasi ideologi politik yang dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat.

- Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya (SARA) yang tinggi di Indonesia dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.
- Munculnya gejala disintegrasi sosial akibat ketimpangan ekonomi, marginalisasi, atau diskriminasi.
- Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dapat menggerus identitas nasional.
- Perubahan dinamika politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat memengaruhi stabilitas dan kondusivitas daerah.
- Potensi konflik sosial yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti ketidakadilan ekonomi, atau isu SARA.
- Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan profesional di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Keterbatasan infrastruktur, seperti sistem informasi dan teknologi, dapat menghambat efektivitas kerja Kesbangpol.
- Koordinasi yang kurang efektif antara Kesbangpol dengan instansi pemerintah lainnya, TNI/Polri, dan organisasi masyarakat.
- Penyebaran berita bohong dan informasi yang menyesatkan dapat memecah belah persatuan dan merusak tatanan sosial.
- Rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga negara dapat menghambat upaya Kesbangpol dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kesbangpol adalah sebagai berikut :

1. Tantangan
    - Penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
    - Kurangnya pemahaman dan internalisasi Pancasila, terutama di kalangan generasi muda.
    - Polarisasi ideologi politik di masyarakat.
    - Potensi konflik akibat keberagaman SARA.
    - Pengaruh budaya asing yang menggerus identitas nasional.
    - Dinamika politik yang dapat mempengaruhi stabilitas daerah.
    - Potensi konflik sosial.

- Koordinasi yang lemah antar instansi dan dengan organisasi masyarakat.
- Kurangnya sinergi program dengan program pembangunan lainnya.
- Penyebaran disinformasi dan hoaks.
- Rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
- Keterbatasan anggaran.
- Kurangnya SDM yang kompeten.
- Keterbatasan infrastruktur pendukung.

2. Peluang
   - Kedekatan dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memperkuat nilai toleransi.
   - Potensi kerja sama dengan organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Pancasila.
   - Kekayaan budaya lokal sebagai sarana untuk memperkuat wawasan kebangsaan.
   - Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
   - Partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan sosial dan budaya.
   - Sinergi dengan media lokal untuk menyebarkan informasi positif dan menangkal hoaks.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	***PROGRAM KEGIATAN SKPD***				**16.911.200.000**	***PROGRAM KEGIATAN SKPD***				**16.621.093.224**	
A.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Nganjuk***	***Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***	72,31 Nilai	**5.228.200.000**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***		***Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***	72,31	**5.820.423.234**	
1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan	17 Dok	151.000.000	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nganjuk	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan***	17 lap	171.605.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6 dok	59.000.000	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Nganjuk	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	6 dok	63.975.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 lap	92.000.000	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Nganjuk	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 lap	107.630.000	
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nganjuk	Jumlah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	39 dok	2.817.600.000	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				3.022.256.000	
							Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 org/bln	2.908.031.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 org/bln	2.710.000.000	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 org/bln	2.908.031.000	
							Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	13 Lap	114.225.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	12.600.000	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	16.920.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	95.000.000	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD*	Nganjuk	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	97.305.000	
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nganjuk	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	2 dok	112.800.000	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Nganjuk	Jumlah dokumen peningkatan disiplin kepegawaian yang disiapkan	2 dok	150.922.750	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nganjuk	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	9.800.000	*Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya*	Nganjuk	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	15.856.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	103.000.000	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	135.066.750	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nganjuk	Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun	4 Laporan	705.300.000	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nganjuk	Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun	4 Laporan	709.417.911	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nganjuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	144.000.000	*Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	Nganjuk	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	115.825.661	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nganjuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	22.000.000	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	Nganjuk	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	62.481.250	
	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	9.000.000	*Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	Nganjuk	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	7.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	530.300.000	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	523.311.000	
5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan	20 unit	403.069.323	
	Pengadaan Mebel	Nganjuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	80.000.000	*Pengadaan Mebel*	Nganjuk	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	14.718.600	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nganjuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	120.000.000	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Nganjuk	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	388.350.723	
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nganjuk	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disusun	13 laporan	74.500.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nganjuk	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disusun	13 laporan	105.450.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.500.000	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.250.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72.000.000	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	Nganjuk	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	103.200.000	
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan perawatan	48 unit	1.167.000.000	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nganjuk	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan perawatan	48 unit	1.257.702.250	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	310.000.000	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	Nganjuk	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	310.973.000	
	Pemeliharaan Mebel	Nganjuk	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	4.000.000	*Pemeliharaan Mebel*	Nganjuk	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	4.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	263.000.000	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	Nganjuk	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	245.256.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	590.000.000	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	Nganjuk	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	697.473.150	
II,	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Nganjuk	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	85%	3.121.000.000	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Nganjuk	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	3.012.495.040	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Nganjuk	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	3100 orang	3.121.000.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Nganjuk	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	3100 orang	3.012.495.040	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3100 orang	1.650.000.000	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3100 orang	1.531.488.400	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	21.000.000	*Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	5.250.000	
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dok	1.450.000.000	*Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka*	Nganjuk	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dok	1.475.756.640	
III.	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Nganjuk	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD	100%	5.450.000.000	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Nganjuk	Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD	100%	5.187.622.500	
								Cakupan pemahaman pendidikan politik bagi masyarakat	81%		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Nganjuk	Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	9 parpol	5.450.000.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta**	Nganjuk	Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik	9 parpol	5.187.622.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 orang	420.000.000	*Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 orang	403.665.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 orang	5.000.000.000	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 orang	4.777.657.500	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	30.000.000	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	6.300.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Nganjuk	Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan	67%	1.207.500.000	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Nganjuk	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam penguatan demokrasi	67%	868.149.100	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Nganjuk	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan	4 ormas	1.207.500.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Nganjuk	Jumlah kegiatan yang difasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan	4 ormas	868.149.100	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	112 orang	1.200.000.000	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	112 orang	857.649.100	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	7.500.000	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	10.500.000	
V.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Nganjuk	Persentase peningkatan dan pemahaman Masyarakat terhadap ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100%	492.500.000	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Nganjuk	Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan	100%	555.925.950	
1	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Nganjuk	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	10 Kegiatan	492.500.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Nganjuk	Jumlah kegiatan yang difasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan	1050 orang	555.925.950	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1050 orang	490.000.000	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1050 orang	554.125.950	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	2.500.000	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	1.800.000	
VI.	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Nganjuk	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	100%	1.412.000.000	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Nganjuk	Cakupan laporan kewaspadaan dini di daerah yang ditindaklanjuti	100%	1.176.477.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Nganjuk	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini	12 Laporan	1.412.000.000	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Nganjuk	Jumlah laporan kewaspadaan dini yang disusun	200 orang	1.176.477.400	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	500.000.000	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	411.341.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 laporan	32.000.000	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	Nganjuk	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 laporan	13.125.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	880.000.000	*Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	Nganjuk	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	752.010.600	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".** Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia emas 2045 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026 ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk mMeningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan Bawah untuk Pertumbuhan ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundukan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap

tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Berdasarkan telaahan tersebut dan merujuk pada Tabel 4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Nganjuk, maka **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk** berkontribusi langsung pada:

- **Prioritas Nasional ke-1:** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM.
- **Prioritas Provinsi Jawa Timur** : JATIM HARMONI- Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilai-nilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga
- **Prioritas Kabupaten Nganjuk** : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah

Adapun program yang menjadi bentuk kontribusi terhadap prioritas tersebut antara lain:

- Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik sosial;
- Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah "Meningkatkan tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan Nilai toleransi keagamaan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Meningkatkan tatanan sosial politik yang demokratis dalam kehidupan berbangsa yang harmonis	Indeks Harmoni Kab. Nganjuk	6,47
	Indeks Demokrasi Kab. Nganjuk	86,85
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2026**
Meningkatkan Nilai toleransi keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,34

Sumber: Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2026 yaitu Peningkatan daya saing daerah dan transformasi pelayanan publik.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif melalui Investasi, Pengembangan Produk Unggulan Lokal, Swasembada Pangan dan Air, serta Perluasan Lapangan Pekerjaan
2. Mendorong Daya Saing Daerah dan Produktivitas Sektor Potensial Berbasis Ekonomi Digital
3. Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kesejahtreaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan serta Kemandirian Desa
5. Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul, Sehat, Cerdas dan Berdaya Saing, Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Sosial Masyarakat
6. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Infrastruktur Layanan Dasar

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan
8. Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. NGANJUK
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**16.621.093.223,76**							**15.427.650.000,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**16.621.093.223,76**							**15.427.650.000,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**16.621.093.223,76**							**15.427.650.000,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***	**-**			**72,31 Nilai**	**5.820.423.233,76**						**-**	**4.627.000.000,00**	
		[meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72.90**	**72,1**	**72,21**	**72,31**	**5.820.423.233,76**	-	-	-	-	-	-	**4.627.000.000,00**	-
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan*	-			17 Dokumen	171.605.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol	-	124.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	63.975.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		44.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	107.630.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun* *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			13 Laporan 180 Orang/bulan	3.022.256.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol	-	2.807.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				180 Orang/bulan	2.908.031.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		2.700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	16.920.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	97.305.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	-	-	-	-	-	**5.820.423.233,76**	-	-	-	-	-	-	**4.627.000.000,00**	-
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen peningkatan disiplin kepegawaian yang disiapkan*	-			2 Dokumen	150.922.750,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol	-	114.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	15.856.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	135.066.750,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		103.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		[meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72.90**	**72,1**	**72,21**	**72,31**	**5.820.423.233,76**	-	-	-	-	-	-	**4.627.000.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun*	-			4 Laporan	709.417.911,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol	-	545.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	115.825.661,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		107.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	62.481.250,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	523.311.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		420.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan*	-			20 Unit	403.069.322,76			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol	-	57.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	14.718.600,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	388.350.722,76	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disusun*	-			13 Laporan	105.450.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol	-	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.250.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	103.200.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		77.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan perawatan*	-			29 Unit	1.257.702.250,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol	-	900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	310.973.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		204.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	4.000.000,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				29 Unit	245.256.100,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		215.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	697.473.150,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Mangundikaran	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Bakesbangpol		470.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	-			**85 %**	**3.012.495.040,00**						-	**2.907.250.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	**3.012.495.040,00**	-	-	-	-	-	-	**2.907.250.000,00**	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan*	-			3100 Orang	3.012.495.040,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar	-	2.907.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3100 Orang	1.531.488.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	5.250.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		7.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				1 Dokumen	1.475.756.640,00	Kab. Nganjuk, Nganjuk, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Cakupan pemahaman pendidikan politik bagi masyarakat Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD***	**-**			**81 % 100 %**	**5.187.622.500,00**						**-**	**5.302.500.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik*	-			9 Parpol	5.187.622.500,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Partai Politik dan masyarakat	-	5.302.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1000 Orang	403.665.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Partai Politik dan masyarakat		400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				27 Orang	4.777.657.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Partai Politik dan masyarakat		4.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				4 Laporan	6.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Partai Politik dan masyarakat		2.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase ormas penerima hibah***	-			**66,67 %**	**868.149.100,00**						-	**902.700.000,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah ormas yang diberdayakan dalam penguatan demokrasi*	-			4 ormas	868.149.100,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Ormas	-	902.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				112 Orang	857.649.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Ormas		900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4 Laporan	10.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Ormas		2.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan***	**-**			**100 %**	**555.925.950,00**						**-**	**493.500.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah kegiatan yang difasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan*	-			10 kegiatan	555.925.950,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar	-	493.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1050 Orang	554.125.950,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		490.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	1.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Cakupan laporan kewaspadaan dini di daerah yang ditindaklanjuti***	-			**100 %**	**1.176.477.400,00**						-	**1.194.700.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah laporan kewaspadaan dini yang disusun*	-			12 Laporan	1.176.477.400,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar	-	1.194.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	411.341.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	13.125.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		4.700.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	752.010.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif PD 8 : Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Masyarakat/pelajar		810.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							**16.621.093.223,76**							**15.427.650.000,00**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Umum.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2026)
1.	Peningkatan Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya serta Ketahanan Daerah	Rp. 16.621.093.223,76

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
1.	Meningkatkan Nilai toleransi keagamaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,34	Rp.16.621.093.223,76

TABEL 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Uraian (Output)	Indikator Kinerja Target	Pagu Indikatif
	Urusan Pemerintahan Umum			
	Kesatuan Bangsa dan Politik			**16.621.093.224**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**72,31**	**2.798.167.234**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan**	**17 lap**	**171.605.000**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	6 dok	63.975.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 lap	107.630.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**180 org/bln**	**2.908.031.000**
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 org/bln	2.908.031.000
		Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun	**13 Lap**	**114.225.000**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	16.920.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 lap	97.305.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen peningkatan disiplin kepegawaian yang disiapkan**	**2 dok**	**150.922.750**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	15.856.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	135.066.750
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun**	**4 Laporan**	**709.417.911**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	115.825.661
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	62.481.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	7.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26 laporan	523.311.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disediakan**	**20 unit**	**403.069.323**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	14.718.600
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	388.350.723
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disusun**	**13 laporan**	**105.450.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.250.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	103.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan perawatan**	**48 unit**	**1.257.702.250**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	310.973.000

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Uraian (Output)	Indikator Kinerja Target	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	4.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 unit	245.256.100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	697.473.150
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**85%**	**3.012.495.040**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	**Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan**	**3100 orang**	**3.012.495.040**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3100 orang	1.531.488.400
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 laporan	5.250.000
	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dok	1.475.756.640
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase kegiatan pendidikan politik pada kader partai politik yang mendapat kursi di DPRD**	**100%**	**5.187.622.500**
		Cakupan pemahaman pendidikan politik bagi masyarakat	**81%**	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam pendidikan politik**	**9 parpol**	**5.187.622.500**
	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 orang	403.665.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	27 orang	4.777.657.500

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Uraian (Output)	Indikator Kinerja Target	Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 laporan	6.300.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	**Jumlah ormas yang diberdayakan dalam penguatan demokrasi**	**67%**	**868.149.100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	**Jumlah kegiatan yang difasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan**	**4 ormas**	**868.149.100**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	112 orang	857.649.100
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan	10.500.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Cakupan kegiatan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan**	**100%**	**555.925.950**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah kegiatan yang difasilitasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, kerukunan umat beragama, P4GN dan Aliran Kepercayaan**	**1050 orang**	**555.925.950**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1050 orang	554.125.950
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan	1.800.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Cakupan laporan kewaspadaan dini di daerah yang ditindaklanjuti**	**100%**	**1.176.477.400**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Jumlah laporan kewaspadaan dini yang disusun**	**200 orang**	**1.176.477.400**
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 orang	411.341.800

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 laporan	13.125.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dok	752.010.600

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2024

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pe-milihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	Belanja Hibah Uang	DPC PDIP	1.017.742.500	135.699 x 7.500,00 = 1.017.742.500	
			DPC PKB	955.125.000	127.350 x 7.500,00 = 955.125.000	
			DPC Partai Gerindra	647.782.500	86.371 x 7.500,00 = 647.782.500	
			DPC Partai Demokrat	487.725.000	65.030 x 7.500,00 = 487.725.000	
			DPD Partai Golkar	483.375.000	64.450 x 7.500,00 = 483.375.000	
			DPC Partai Hanura	481.650.000	64.220 x 7.500,00 = 481.650.000	
			DPD Partai Nasdem	384.825.000	51.310 x 7.500,00 = 384.825.000	
			DPD PKS	163.845.000	21.846 x 7.500,00 = 163.845.000	
			DPC PPP	155.587.500	20.745 x 7.500,00 = 155.587.500	
	JUMLAH 1			4.777.657.500		
2	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Ormas, Pegawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	Belanja Hibah Uang	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk	100.000.000		
			Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk	250.000.000		
			Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Nganjuk	100.000.000		
			BAZNAS	200.000.000		
	JUMLAH 2			650.000.000		
	JUMLAH 1 + 2			5.427.657.500		

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi,

pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001